

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS DESA WISATA BERBASIS RELIGI NYATNYONO

Farhan Fastabikhul Khoir, Maesaroh, Ari Subowo

Program Studi S1 Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto SH Tembalang, Semarang, Kode Pos

1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>

email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Tourism is one of the strategic sectors in regional development, playing an important role in job creation and community empowerment. One form of tourism development is the establishment of tourism villages. Semarang Regency has several local tourism potentials, one of which is the Nyatnyono Tourism Village, which is rooted in Islamic values. However, despite its great potential, the Tourism Village of Nyatnyono still faces challenges, particularly the lack of public transportation that connects directly to the village. This absence of public transport results in low accessibility, making it difficult for tourists without private vehicles to visit. Accessibility is a crucial element in enhancing the competitiveness of a tourist destination. This issue requires serious attention from the village government as the main actor in local development. This study aims to analyze the role of the Village Government in developing the Religious Tourism Village of Nyatnyono, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The study refers to Syafri's theory, which divides the role of village government into four functions: service, regulation, empowerment, and development. Additionally, the supporting and inhibiting factors are analyzed using the theory of Todaro and Smith, which states that regional development success is influenced by four main variables: social capital, institutional capacity, infrastructure, and supportive fiscal policies. The findings indicate that the Nyatnyono Village Government has implemented all four functions. Supporting factors come from both the community and the government. However, there are obstacles, mainly in the form of resistance to change related to policy implementation. The recommended solution is to promote two-way discussions in policymaking and to involve religious leaders who have strong influence within the local community to foster acceptance.

Keywords: Accessibility, Tourism Village, Role of Village Government, Community, Nyatnyono.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata menjadi satu dari sebagian sektor strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sektor ini juga menyimpan peran penting dalam membawa lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan mendorong pelestarian budaya serta lingkungan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024). Satu dari sebagian bentuk pengembangan pariwisata yang berkembang saat ini adalah desa wisata, yaitu desa yang menawarkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal seperti alam, budaya, dan tradisi masyarakat. Desa wisata menjadi wujud nyata dari pembangunan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism), yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata (Nugroho D. S., 2018).

Di antara berbagai bentuk desa wisata, desa wisata berbasis religi memiliki karakteristik khas karena menggabungkan nilai spiritual dan budaya dalam pengalaman wisata. Satu dari sebagian contoh desa wisata religi yang berkembang adalah Desa Nyatnyono, yang berposisi di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa ini dikenal sebagai tujuan wisata ziarah, dengan daya tarik utama berupa makam Waliyullah Ki Ageng Nyatnyono. Desatinasi tersebut banyak

didatangi peziarah dari berbagai daerah yang pada tahun 2022 telah dikunjungi oleh 230.962 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2022). Potensi wisata religi ini diperkuat dengan suasana alam yang asri, udara pegunungan yang sejuk, dan budaya masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai keagamaan.

Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung Tempat Rekreasi di Kabupaten Semarang

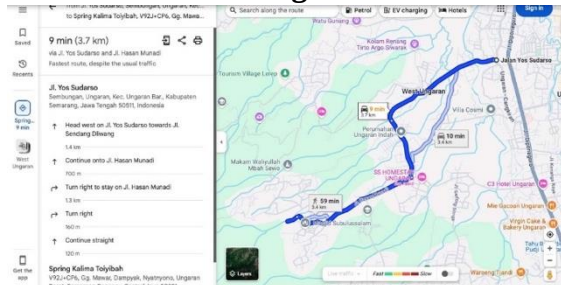
Tempat Rekreasi	Jumlah Pengunjung		
	Domestik	Asing	Total
WISATA ALAM			
1 Air Terjun Curug Lawe	19,314	-	19,314
2 Air Terjun Semirang	17,792	-	17,792
3 Curug Tujuh Bidadari	-	-	-
4 Klenteng Kuning	1,660	-	1,660
5 Lereng Kelir	-	-	-
6 Muncul River Tubing	10,947	-	10,947
7 Vana Prastha Gedong Songo	7,837	-	7,837
8 Wana Wisata Penggaron	-	-	-
9 Pendakian Thekelan	17,633	-	17,633
10 10. Wisata Alam Perantunan	5,304	12	5,316
WISATA BUDAYA			
1 Candi Gedongsongo	425,738	529	426,267
2 Goa Maria Kerep Ambarawa	107,873	-	107,873
3 Makam Hasan Munadi Nyatnyono	230,9	-	230,962
4 Museum Kereta Api Ambarawa	162,408	331	162,739
5 Palagan Ambarawa	28,847	-	28,847

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2022)

Namun, di balik potensi tersebut, terdapat permasalahan mendasar yang menghambat pengembangan Desa Wisata Religi Nyatnyono secara optimal. Masalah utama yang diidentifikasi adalah tidak adanya kendaraan umum yang terkoneksi langsung ke lokasi desa wisata. Ketiadaan transportasi umum berdampak pada rendahnya aksesibilitas, sehingga menyulitkan wisatawan yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk berkunjung. Aksesibilitas merupakan satu dari sebagian unsur penting dalam daya saing destinasi wisata, dan keberadaan transportasi publik

yang memadai menjadi syarat utama untuk menarik kunjungan wisatawan (Pitana, 2009).

Gambar 1.2 Jarak Titik Transportasi Umum Terdekat dengan Lokasi wisata



Sumber : (Google Maps, 2025)

Tidak adanya jalur angkutan umum yang langsung ke Nyatnyono menyebabkan wisatawan harus memakai kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan dari pusat kota. Hal ini tidak hanya membatasi jumlah kunjungan, tetapi juga mengurangi kenyamanan wisatawan, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Permasalahan ini menuntut perhatian dari pemerintah desa sebagai aktor utama dalam pembangunan lokal. Dalam konteks otonomi desa, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola potensi lokal serta menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang searah dengan kebutuhan masyarakat (Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa). Maka itu, peran pemerintah desa sangat krusial dalam menciptakan solusi atas masalah akses transportasi dan ketersediaan penginapan.

Menurut Syafri (2002), peran pemerintah mencakup empat fungsi utama: fungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, dan pembangunan. Dalam

fungsi pelayanan, pemerintah desa diharapkan dapat menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan wisatawan, seperti akses jalan, transportasi umum, dan akomodasi. Dalam fungsi pengaturan, pemerintah menyusun aturan dan kebijakan lokal yang mendukung pengelolaan wisata secara tertib dan berkelanjutan. Fungsi pemberdayaan menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan berkendara yang searah dengan tata tertib yang berlaku, pengelolaan wisata religi, atau penyediaan jasa transportasi lokal. Sementara fungsi pembangunan mencakup pembangunan fisik dan infrastruktur pendukung pariwisata (Syarfi, 2002).

Di Desa Nyatnyono, keberhasilan pengembangan wisata religi sangat bergantung pada bagaimana pemerintah desa melaksanakan keempat fungsi tersebut secara integratif dan partisipatif. Pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk menjadi pelaksana kebijakan dari pemerintah kabupaten atau pusat, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan dari bawah (bottom-up). Ini termasuk menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan terkait pembukaan jalur transportasi umum, serta mengalokasikan anggaran dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata.

Namun demikian, peran ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas sumber daya

manusia, serta kepentingan masyarakat. Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk mengembangkan wisata berbasis komunitas di Nyatnyono, mengingat tingginya minat wisata religi dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah terhadap pengembangan desa wisata.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Aksesibilitas Desa Wisata Berbasis Religi Nyatnyono.”** Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana peran yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam merespons permasalahan utama tersebut, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat realisasinya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan kebijakan di tingkat desa serta memperkuat kajian akademik berkenaan pengelolaan desa wisata berbasis lokal.

Oleh karena itu, peneliti akan mengambil dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Aksesibilitas Desa Wisata berbasis religi Nyatnyono?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan Aksesibilitas Desa Wisata berbasis religi Nyatnyono?

B. KERANGKA TEORI

Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam (Pasolong, 2010, p. 7). Administrasi Publik adalah proses melibatkan pengelolaan dan pengaturan sumber daya publik dan orang-orang untuk membangun, meloloskan, dan melaksanakan keputusan dalam kebijakan publik. Nigro dan Nigro, antara lain, menyatakan bahwa untuk setiap tindakan hukuman yang berhasil, tindakan tersebut harus dikembangkan dari dalam badan peradilan (Syafiie, 2006, p. 23) administrasi publik adalah:

1. Administrasi Publik adalah kelompok dalam pemerintahan yang bekerja sama.
2. Administrasi Publik berkaitan dengan tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan bagaimana mereka berkaitan.
3. Administrasi Publik membantu mengembangkan kebijakan pemerintah dan karenanya mengambil bagian dalam urusan politik.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat juga erat kaitannya dalam Administrasi Publik dengan berbagai kelompok dan individu swasta.
5. Beberapa aspek Administrasi Publik tidak sama dengan aspek administrasi Perseorangan.

Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik terus

mengalami perkembangan sesuai perubahan konteks keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Barker (dalam Suwitri, 2009, p. 16) menyatakan bahwa paradigma terdiri dari aturan-aturan yang menentukan wilayah tindakan dan perilaku yang sesuai. Thomas Kuhn (dalam Suwitri, 2009) menekankan bahwa dalam menghadapi krisis, sains harus menciptakan paradigma baru yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Menurut Simon (1947), Waldo (1968), Thoha (1988), dalam Sardjudin (1995: 53) dan Tjokroamidjojo (1988: 18–33), terdapat **lima paradigma utama** dalam administrasi publik:

1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900–1930-an)

Paradigma ini menekankan pemisahan antara fungsi politik dan administrasi. Goodnow berpendapat bahwa administrasi harus dilaksanakan tanpa intervensi politik, dengan orientasi pada objektivitas, efisiensi, dan penghematan. Fokusnya adalah birokrasi profesional yang terpisah dari dinamika politik.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1950-an)

Pada fase ini, administrasi dipahami sebagai ilmu universal yang berlaku untuk semua bentuk organisasi. Masukan dari sektor industri dan kemajuan manajemen memperkuat prinsip-prinsip administrasi seperti spesialisasi, hierarki, dan keseragaman prosedural.

3. Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950–1970-an)

Paradigma ini melihat bahwa administrasi tidak bisa dipisahkan dari politik. Administrasi menjadi bagian dari sistem politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan lingkungan sosial. Ilmuwan politik mulai memandang administrasi sebagai bagian dari keilmuan politik, terutama dalam perumusan kebijakan publik.

4. Administrasi sebagai Ilmu Administrasi (1956–1970-an)

Fokusnya bergeser pada pendekatan interdisipliner, dengan kontribusi dari psikologi sosial, teori organisasi, dan ilmu manajemen. Ilmu administrasi dibentuk oleh masukan dari analisis sistem, ekonomi, dan teknologi informasi sebagai bentuk modernisasi pemerintahan.

5. Administrasi sebagai Administrasi Publik (1970-an–sekarang)

Paradigma ini menekankan peran administrasi dalam urusan publik, birokrasi, dan pelayanan masyarakat. Fokusnya bukan hanya pada efisiensi, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat, partisipasi publik, serta pengembangan kebijakan secara kolaboratif.

6. Evolusi Paradigma Modern

Denhardt & Denhardt (dalam Mulyadi, 2016) yang menguraikan perkembangan lebih lanjut administrasi publik melalui empat pendekatan kontemporer berikut:

1. Old Public Administration (OPA)

Dicetuskan oleh Wilson (1887), OPA memiliki karakteristik sentralistik, legalistik, dan hierarkis. Pemerintah berperan dominan dan pelayanan cenderung kaku, dengan minimnya partisipasi masyarakat. Tujuan utama: efisiensi dan kendali birokrasi.

2. New Public Management (NPM)

Sebagai reaksi atas kelemahan OPA, NPM menawarkan pendekatan manajerial yang fleksibel, efisien, dan responsif. Paradigma ini menekankan pada prinsip-prinsip kewirausahaan sektor swasta dalam sektor publik. Vigoda (2003) menyatakan bahwa NPM bertujuan memperkecil birokrasi dan meningkatkan produktivitas melalui desentralisasi dan delegasi ke swasta.

3. New Public Service (NPS)

Merupakan koreksi terhadap OPA dan NPM. NPS memandang warga negara bukan sebagai klien atau konsumen, tetapi sebagai mitra dalam tata kelola. Pemerintah dituntut untuk tidak diskriminatif dan mengutamakan kepentingan publik secara partisipatif.

4. Good Governance

Paradigma ini mengintegrasikan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas sebagai elemen utama. Rondinelli (2007, p. 9) menyebutkan prinsip-prinsip good governance meliputi:

- *Participation*

- *Rule of Law*
- *Transparency*
- *Responsiveness*
- *Consensus Orientation*
- *Equity*
- *Effectiveness and Efficiency*
- *Accountability*
- *Strategic Vision*

Pemerintah Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, pemerintah desa merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan tingkat lokal yang bertugas menangani administrasi masyarakat di wilayahnya. Kepala desa, sebagai pemimpin, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, bupati memberi instruksi melalui camat yang mengawasi pelaksanaan tugas tersebut. Pemerintah desa, sebagai struktur terdekat dengan masyarakat, menjadi ujung tombak pelayanan dan pembangunan lokal (Nugroho & Nugroho, 2021, p. 9).

Pengembangan Pariwisata

Pembangunan didefinisikan oleh W.J.S. Poerwadarminta sebagai upaya berkelanjutan untuk mencapai kemajuan dan manfaat optimal (Amerta, 2019, p. 14). Dalam konteks pariwisata, Samsul Alam Paturusi menjelaskan bahwa pembangunan bertujuan meningkatkan daya tarik wisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi

penduduk lokal, pemerintah, dan industri terkait (Amerta, 2019, p. 14).

Mill (dalam Amerta, 2019) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata bertujuan mencapai keuntungan secara optimal sambil menyelesaikan persoalan lokal. Butler membagi siklus perkembangan pariwisata menjadi enam tahap:

1. Eksplorasi, masyarakat mulai mengenali potensi wisata.
2. Keterlibatan, pembangunan mulai direncanakan serius termasuk infrastruktur.
3. Pembangunan, mulai muncul investasi eksternal.
4. Konsolidasi, pertumbuhan pengunjung melambat.
5. Kestabilan, destinasi mencapai titik jenuh.
6. Penurunan atau Rejuvenasi, destinasi dapat merosot atau bangkit melalui inovasi.

Desa Wisata

Menurut Gamal Suwantoro (dalam Amerta, 2019, p. 27), desa wisata adalah wilayah pedesaan yang mempertahankan keaslian budaya, tata ruang, dan sosial masyarakat, serta menyediakan kebutuhan wisatawan seperti penginapan, makanan, atraksi, dan souvenir. Desa wisata diklasifikasikan sebagai usaha kecil karena dikelola oleh masyarakat, bermodal rendah, dan berbasis sumber daya lokal.

Keberadaannya turut membentuk identitas daerah melalui prinsip dan praktik adat yang lestari.

Peran

Teori peran merupakan salah satu teori utama dalam ilmu sosial yang digunakan untuk menganalisis perilaku individu maupun kelompok dalam struktur sosial tertentu. Dalam konteks pemerintahan, teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah sebagai aktor sosial menjalankan peran dan fungsi yang diharapkan oleh masyarakat serta lembaga-lembaga lain dalam sistem politik. Menurut Bruce J. Biddle (1986), peran adalah kumpulan harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati posisi sosial tertentu.

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata

Pembangunan desa wisata, terutama yang berbasis religi seperti Desa Nyatnyono, menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan transportasi umum. Untuk menjawab tantangan tersebut, Syarfi (2002, p. 108) menawarkan kerangka empat fungsi utama pemerintah desa yang aplikatif:

a) Fungsi Pelayanan

Fungsi ini mencakup penyediaan layanan publik dasar, seperti informasi transportasi, sistem antar-jemput, serta respons terhadap keluhan wisatawan. Pemerintah desa dapat membangun pusat informasi logistik dan menginisiasi kerja sama dengan pengemudi lokal (angkudes,

ojek). Pelayanan berkualitas menjadi fondasi citra positif desa wisata (Pranadji, 2006).

b) Fungsi Pengaturan (Regulasi)

Pemerintah desa berwenang menyusun Peraturan Desa (Perdes) mengenai tarif, rute, dan standar operasional transportasi lokal. Kerja sama dapat dilakukan dengan pihak ketiga, seperti agen perjalanan atau transportasi daring, serta menetapkan zona transportasi wisata. Regulasi yang baik memastikan tertibnya pelayanan dan keamanan wisatawan (Dwiyanto, 2006).

c) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar menjadi subjek pembangunan. Caranya meliputi pelatihan pengemudi lokal, pembentukan koperasi/BUMDes transportasi, serta fasilitasi modal melalui kerja sama dengan lembaga keuangan atau program CSR. Pemberdayaan ini menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan lokal (Chambers, 1994).

d) Fungsi Pembangunan

Pembangunan tidak hanya mencakup infrastruktur fisik seperti peningkatan kualitas jalan dan pembangunan halte, tetapi juga lembaga pendukung dan rambu informasi wisata. Fungsi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, serta dinas teknis seperti Dinas Pariwisata dan Perhubungan (Syarfi, 2002).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 2016), dengan lokasi di Desa Nyatnyono dan subjek utama adalah Pemerintah Desa Nyatnyono. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dari sumber primer (wawancara) dan sekunder (dokumen dan literatur). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2015). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber (Moleong, 2016) untuk memastikan keabsahan dan keandalan informasi yang diperoleh. Peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis peran pemerintah desa dan faktor pendukung serta penghambat dalam pengembangan desa wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Religi Nyatnyono”

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan oleh pemerintah Desa Nyatnyono diwujudkan melalui penyediaan moda transportasi lokal berupa ojek dan ompreng untuk mengatasi keterbatasan akses menuju tempat wisata religi. Moda ini menjawab absennya transportasi umum dari pusat kota dan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal

sebagai pengemudi (Syafri, 2002). Layanan ini memberi nilai tambah ekonomi serta sosial, menciptakan peluang kerja dan memperkuat peran masyarakat dalam sektor pariwisata (Dwiyanto, 2006). Namun, sistem ini masih menghadapi tantangan dari sisi keterjangkauan tarif, keterandalan jadwal, dan keberlanjutan. Solusi strategis berupa pembentukan koperasi transportasi atau kolaborasi dengan pihak ketiga menjadi pilihan untuk memperkuat pelayanan (Grindle, 1980).

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah desa menjalankan fungsi pengaturan dengan menetapkan aturan jam operasional dan tarif moda transportasi. Ompreng beroperasi pukul 06.00–18.00 dan ojek 18.00–06.00 dengan tarif pulang-pergi sebesar Rp20.000 (Syafri, 2002). Kebijakan ini disusun melalui musyawarah, mencerminkan prinsip *participatory governance* (UNDP, 1997). Namun, usulan standarisasi kendaraan menghadapi resistensi warga karena biaya modifikasi dianggap memberatkan. Kendala ini mencerminkan pentingnya komunikasi, insentif, dan pendekatan yang inklusif dalam implementasi kebijakan (Edwards III, 1980). Pendekatan alternatif melalui pelatihan dan insentif teknis menjadi solusi untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi sosial-ekonomi warga.

3. Fungsi Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat menjadi

fokus penting. Pemerintah desa telah mengadakan pelatihan keselamatan berkendara bekerja sama dengan kepolisian serta menyediakan program simpan pinjam melalui BUMDes untuk mendukung pelaku usaha transportasi (Syarfi, 2002). Tujuan dari pemberdayaan ini adalah menciptakan kemandirian, inisiatif, dan profesionalisme warga dalam mendukung pariwisata. Munculnya kelompok kerja informal menjadi indikator tumbuhnya kesadaran kolektif, meskipun belum semua warga menunjukkan partisipasi aktif (Suharto, 2005). Prinsip pembangunan partisipatif dari Chambers (1993) menekankan pentingnya posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong juga dihidupkan kembali melalui kerja bakti dan kegiatan desa lainnya.

4. Fungsi Pembangunan

Pemerintah Desa Nyatnyono berhasil menginisiasi pembangunan fisik berupa pelebaran Jalan Yos Sudarso, jalur utama menuju lokasi wisata, dengan bantuan anggaran dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Proyek ini dilakukan bertahap sejak 2023 (DJPK Kemenkeu, 2025) dan menjadi upaya konkret dalam menjawab kebutuhan infrastruktur wisata (Todaro & Smith, 2011). Selain itu, pemerintah merancang jalur khusus kendaraan wisata dan menerapkan zonasi ruang untuk mengurangi konflik

ruang antara wisatawan dan warga. Langkah ini sejalan dengan prinsip *sustainable tourism development* dari UNWTO (2018). Kendati demikian, keterbatasan anggaran desa menjadi tantangan dalam kelanjutan pembangunan, sehingga kemitraan dengan LSM, universitas, dan sektor swasta menjadi strategi yang perlu dikembangkan (Aji, 2022). Penyusunan *masterplan* pembangunan pariwisata desa berbasis partisipatif menjadi langkah penting untuk menjamin kesinambungan program.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Desa Wisata Religi Nyatnyono

Faktor Pendukung

Pengembangan Desa Wisata Religi Nyatnyono menunjukkan adanya dinamika positif yang didukung oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Berdasarkan Todaro dan Smith (2011), keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh modal sosial, kapasitas kelembagaan, infrastruktur, serta kebijakan fiskal yang berpihak.

1. Modal Sosial.

Partisipasi aktif masyarakat lokal menjadi modal sosial utama dalam pengembangan wisata. Keterlibatan warga terlihat dari pengelolaan omprang, ojek, parkir, hingga penyewaan rumah. Menurut Putnam (2000), kepercayaan, kerja sama, dan solidaritas menjadi dasar pembangunan berbasis komunitas. Pemerintah desa

bertindak sebagai fasilitator, namun masyarakat merupakan penggerak utama keberhasilan program.

2. Kapasitas Kelembagaan.

Kolaborasi lintas lembaga juga memperkuat pengembangan wisata. Contohnya adalah pelatihan keselamatan berkendara oleh kepolisian yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menunjukkan adanya sinergi antarinstansi (Ansell, 2008). Ini menunjukkan pentingnya governance kolaboratif dalam mendukung pelayanan pariwisata yang profesional.

3. Kebijakan Fiskal.

Dukungan fiskal juga sangat signifikan. Pada 2023 dan 2024, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran masing-masing Rp1,29 miliar dan Rp1 miliar untuk pembangunan jalan desa. Dana ini memperkuat aksesibilitas desa wisata. Selain itu, pengelolaan Dana Desa dan PAD diarahkan untuk mendukung operasional BUMDes, infrastruktur ringan, dan promosi digital. Dukungan anggaran yang berpihak pada sektor pariwisata menjadi indikator bahwa pemerintah melihat wisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi lokal.

Faktor Penghambat

Meski menunjukkan perkembangan, proses pengembangan Desa Wisata Nyatnyono juga menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

1. Resistensi terhadap Perubahan.

Salah satu tantangan utama adalah penolakan masyarakat terhadap upaya standarisasi moda transportasi lokal. Pemerintah desa menginginkan kendaraan wisata yang seragam dan aman, tetapi masyarakat menolak karena kendaraan yang digunakan bersifat pribadi dan telah dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Kepala Desa menyatakan dalam wawancara (7 Mei 2025) bahwa mengubah kebiasaan warga membutuhkan pendekatan persuasif. Hal ini sesuai dengan pandangan Chambers (1993) bahwa pembangunan partisipatif hanya akan berhasil jika masyarakat dilibatkan sejak awal dan tidak merasa dipaksa.

2. Kapasitas Kelembagaan

Kerjasama eksternal telah dilakukan dalam bentuk pelatihan keselamatan berkendara yang difasilitasi oleh kepolisian. Namun kerjasama yang ada masih belum terjalin dengan institusi terkait seperti Dishub. Pihak desa masih fokus untuk mempersiapkan fondasi internal, seperti pemetaan kebutuhan, penyusunan program, dan identifikasi prioritas pembangunan, sebelum mengajukan dukungan atau kerja sama secara resmi kepada pihak luar.

3. Keterbatasan Infrastruktur Transportasi.

Desa Nyatnyono belum memiliki trayek transportasi umum yang langsung menghubungkannya dengan pusat kota atau terminal utama di Kabupaten Semarang.

Ketergantungan pada kendaraan pribadi membatasi jumlah wisatawan, terutama dari kelompok yang tidak memiliki akses transportasi sendiri. Menurut Gunn (2002), aksesibilitas merupakan kunci utama dalam pengembangan destinasi wisata. Oleh karena itu, perlu adanya advokasi untuk membuka jalur angkutan wisata yang terjadwal, murah, dan terintegrasi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Nyatnyono telah menunjukkan upaya konkret dalam menjalankan fungsinya dalam pengembangan desa wisata religi, khususnya melalui penyediaan layanan transportasi lokal. Ketiadaan kendaraan umum dari pusat kota menuju desa menjadi tantangan utama dalam hal aksesibilitas. Untuk menjawab hal ini, pemerintah desa menyediakan moda transportasi lokal berupa ojek dan ompreng yang menjangkau area parkir hingga lokasi utama wisata religi, seperti makam Waliyullah Ki Ageng Pandanaran dan sendang. Layanan ini tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, memperlihatkan bahwa fungsi pelayanan desa tidak hanya administratif tetapi juga berdaya ekonomi dan sosial.

Dalam aspek pengaturan, pemerintah desa menetapkan jadwal operasional yang membedakan waktu layanan ojek dan ompreng guna menghindari tumpang tindih

dan menjamin keselamatan, khususnya di malam hari. Tarif yang dikenakan pun disepakati secara musyawarah antara pemerintah dan pelaku transportasi lokal. Fungsi pengaturan ini penting sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan dan menjawab kebutuhan wisatawan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama pemerintah desa. Melalui pelatihan keselamatan berkendara bersama kepolisian dan program simpan pinjam BUMDes, warga didorong untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam sektor transportasi wisata. Program ini mendukung inklusi keuangan dan kemandirian ekonomi lokal. Namun, seperti disampaikan Suharto (2005), pemberdayaan sejati harus ditandai dengan munculnya inisiatif dan keberanian dari masyarakat untuk mengembangkan potensi secara mandiri. Hal ini mulai terlihat melalui kelompok-kelompok kerja informal yang mengelola penginapan dan promosi wisata, meskipun partisipasi masyarakat belum merata.

Strategi pemberdayaan ke depan perlu memperkuat pendekatan partisipatif, sebagaimana disarankan Chambers (1993), dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah desa perlu menjadi fasilitator yang menyediakan ruang dialog dan menyerap aspirasi lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Desa Nyatnyono memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata religi yang khas. Untuk itu, diperlukan pengembangan masterplan pariwisata desa yang menyeluruh, mencakup kebutuhan infrastruktur, strategi pembiayaan, zonasi, serta integrasi antarprogram pembangunan. Masterplan ini akan memudahkan pengajuan proposal ke berbagai lembaga terkait, baik dalam bidang pariwisata, pendidikan, maupun pelestarian budaya.

Namun, tantangan tetap ada. Di antaranya resistensi sebagian masyarakat terhadap perubahan, keterbatasan sistem transportasi regional, dan lemahnya koordinasi lintas wilayah. Chambers (1993) menekankan bahwa partisipasi sejati adalah kunci untuk mengurangi resistensi dan membangun rasa kepemilikan terhadap perubahan. Pemerintah desa perlu mengupayakan komunikasi dua arah dalam menyusun kebijakan, termasuk pemberian insentif agar warga lebih terbuka terhadap inovasi.

Hambatan penting lainnya adalah ketergantungan wisatawan pada transportasi pribadi. Minimnya moda transportasi umum menuju desa menghambat peningkatan kunjungan secara inklusif, terutama dari kalangan pelajar, lansia, atau kelompok wisata dengan anggaran terbatas. Walau kewenangan desa terbatas dalam transportasi lintas wilayah, pemerintah desa dapat memainkan peran sebagai mediator

kebijakan kepada pihak kabupaten atau operator transportasi untuk membuka rute khusus wisata.

Secara keseluruhan, peran pemerintah desa Nyatnyono dalam pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, dan pembangunan telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan wisata religi berbasis komunitas. Ke depan, integrasi peran ini dengan sinergi lintas sektor menjadi kunci sukses pembangunan desa wisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal..

SARAN

Dalam mengatasi resistensi masyarakat terhadap perubahan, pemerintah desa sebaiknya tidak hanya menyosialisasikan kebijakan secara satu arah, tetapi mengajak masyarakat berdialog sejak awal perencanaan. Melalui forum musyawarah desa, kelompok diskusi terfokus (FGD), atau pertemuan RT/RW, masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka secara langsung. Dengan demikian, kebijakan seperti standarisasi kendaraan akan lebih mudah diterima karena diproses secara bersama. Di sisi lain pemerintah adapat memberikan insentif bagi pemilik kendaraan ompreng dan ojek yang bersedia menyesuaikan tampilan atau kelayakan kendaraannya sesuai standar, pemerintah desa dapat memberikan bantuan berupa subsidi cat kendaraan, rompi pengemudi,

atau alat keselamatan berkendara. Ini menjadi bentuk penghargaan terhadap partisipasi aktif tanpa memaksakan perubahan secara sepihak. Perubahan sosial memerlukan pendekatan yang selaras dengan nilai lokal. Libatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat dalam proses komunikasi kebijakan, agar mereka dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. Peran mereka sangat penting dalam membentuk opini publik dan mengurangi resistensi.

Dalam memenuhi penguatan jaringan dan advokasi eksternal pemerintah desa dapat melakukan pelatihan perencanaan program, pembuatan proposal kerja sama, dan advokasi kebijakan agar perangkat desa lebih siap menjalin kemitraan dengan lembaga eksternal. Identifikasi dan jalin komunikasi awal dengan institusi seperti Dishub, Bappeda, serta universitas atau lembaga yang memiliki kepedulian terhadap transportasi pedesaan dan pengembangan pariwisata.

Permasalahan infrastruktur dapat dilakukan dengan upaya pengajuan dokumen usulan resmi pembukaan trayek baru atau layanan angkutan wisata dari kota/kecamatan ke Desa Nyatnyono, dilengkapi data potensi wisata dan jumlah kunjungan. Pemerintah desa dapat mengajukan proposal ke CSR perusahaan untuk pembangunan shelter, rambu, papan informasi, dan fasilitas pendukung

transportasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, F. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Pakuncen. *Paradigma*.
- Amerta, I. M. (2019). *Pengembangan Pariwisata Alternatif*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ansell, C. &. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Aji, R. R. (2022). *Community Based Ecotourism: A Case Study of Pentingsari Village*. *UIJ Journal*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2022, Juni 5). *Banyaknya Pengunjung di Tempat Rekreasi di Kabupaten Semarang Tahun 2022*. Diambil kembali dari semarangkab.bps.go.id: <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUxIzE=/banyaknya-pengunjung-di-tempat-rekreasi-di-kabupaten-semarang-tahun-2022.html>
- Bogdan, R. &. (2011). In L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. (p. 4). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Chambers, R. (1993). *Challenging the professions: Frontiers for rural development*. London: Intermediate Technology Publications.
- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience. *World Development*, 22(9), 1253-1268.
- DJPK Kemenkeu. (2025, Januari 21). *Provinsi Jawa Tengah*. Diambil kembali dari www.djpk.kemenkeu.go.id: <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Provinsi-Jawa-Tengah.pdf>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Google Maps. (2025, Januari 22). *Google.com*. Diambil kembali dari Google Maps: <https://www.google.com/maps/dir/-7.132998,110.4026089/V92M%2B343+Makam+syech+Munadi+nyatnyono,+Dampyak,+Nyatnyono,+Kec.+Ungaran+Bar.,+Kabupaten+Semarang,+Jawa+Tengah+50551/@-7.1328489,110.4022736,20.1z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x2e708750d6c5917b:0xb205>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Gunn, C. A. (2002). *Tourism planning: Basics, concepts, cases (4th ed.)*. Washington, DC: Taylor & Francis.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*.
- Hidayat, E. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2024, April 18). *Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020–*

- 2024 (Perubahan). Diambil kembali dari Kemenparekraf.go.id: https://katalogdata.kemenparekraf.go.id/dataset/bdb904d7-5f62-49d0-a924-6fb71157ce20/resource/5ad4cd33-8263-4036-ba19-70ff0b2741f2/download/rencana-strategis-kemenparekraf-baparekraf-2020-2024-perubahan_comp.pdf
- Miles, M. B. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. S. (2018). Community Based Tourism: Tantangan Dusun Nglepen dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Pariwisata*, 45-52.
- Nugroho, R. &. (2021). *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: Elex Media Komputiondo.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pitana, I. G. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Pranadji, T. (2006). Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering. *Jurnal Agro Ekonomi*, 178-206.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*. Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara.
- Rondinelli, D. A. (2007). *Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens*. New York: United Nation.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suwitri, S. (2009). Ilmu Administrasi Publik. *Universitas Diponegoro*, 16.
- Syafiie, M. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syarfi, M. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Otonomi, Demokrasi dan Partisipasi*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi (Edisi ke-11, Jilid 1 dan 2)*. Jakarta: Erlangga.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- UNWTO. (2018). *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030*. Madrid: United Nations World Tourism Organization.
- Vigoda, E. (2003). New Public Management. In J. Rabin, *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*

(pp. 812-816). New York: Marcel Dekker.

Wilson, W. (1887). The study of administration. *Political Science Quarterly*, 197-222.